

B A B V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Evaluasi Pengelolaan Persediaan Logistik Obat Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2015, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dari faktor *input*, dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Dari tenaga atau personil yang dimiliki oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman belum sesuai dengan teori Standar Sarana Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
- 2). Dari biaya atau dana yang dimiliki oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan persediaan logistik obat sudah sesuai dengan teori Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi/Kabupaten/Kota.
- 3). Dari sarana yang dimiliki oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman kurang sesuai dengan teori Standar Sarana Penyimpanan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
- 4). Dari kebijakan pemerintah yang mempengaruhi UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan pengelolaan persediaan logistik obat seperti Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Melalui *E-Purchasing*, Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/525/2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2015, dan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Dari faktor *process*, dapat disimpulkan bahwa:

- 1). Dari perencanaan kebutuhan persediaan logistik obat yang dilakukan oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman sudah sesuai dengan teori Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi/Kabupaten/Kota tentang perencanaan kebutuhan persediaan logistik obat.
- 2). Dari analisis ABC atau Pareto Analisis yang dilakukan, terdapat 322 (tiga ratus dua puluh dua) item obat pada UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman, yang kesemuanya itu termasuk kedalam kelompok A. Hal ini disebabkan karena anggaran yang didapatkan pada tahun anggaran 2016 jauh lebih besar daripada kebutuhan anggaran untuk pengadaan persediaan logistik obat pada tahun 2016 ini.
- 3). Dari pengadaan persediaan logistik obat yang dilakukan oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman sudah sesuai dengan teori Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui *E-Purchasing*).

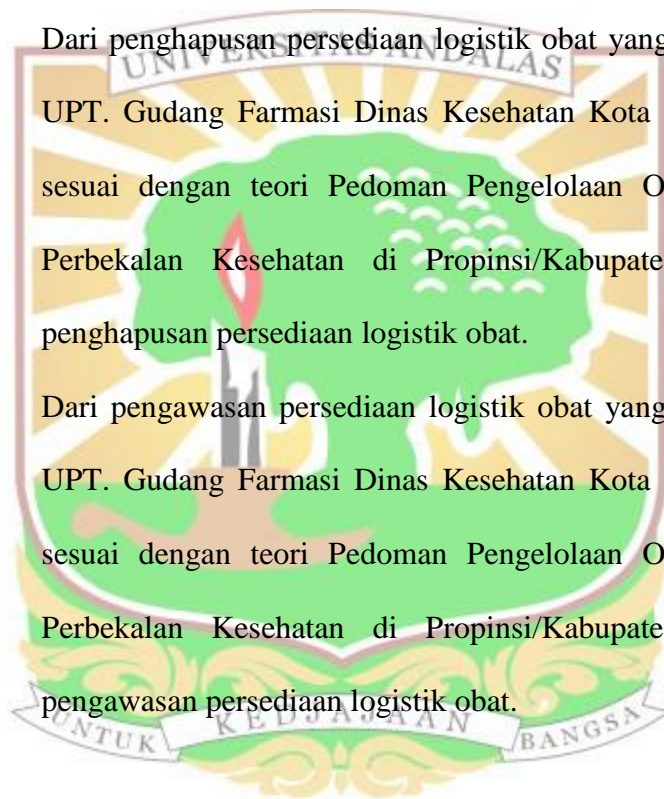
- 4). Pada UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman melalui Dinas Kesehatan Kota Pariaman sebagai pelaksana pengadaan persediaan logistik obat tidak menerapkan metode *Economic Order Quantity* (EOQ). Hal ini disebabkan oleh sistem pengadaan pada Instansi Pemerintah yang menggunakan sistem *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik. Rekanan pemenang pengadaan persediaan logistik obat pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman hanya mendistribusikan masing-masing persediaan logistik obat ke UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman sekali waktu saja sesuai dengan jumlah persediaan logistik obat yang tertera pada dokumen kontrak pengadaan persediaan logistik obat tersebut.
- 5). Dari penyimpanan persediaan logistik obat yang dilakukan oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman setelah persediaan logistik obat diterima atau masuk sudah sesuai dengan teori Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi/Kabupaten/Kota tentang penyimpanan persediaan logistik obat.
- 6). Dari pendistribusian persediaan logistik obat yang dilakukan oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman sudah sesuai dengan teori Pedoman Pengelolaan Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi/Kabupaten/Kota tentang pendistribusian persediaan logistik obat.

7). Dari pencatatan dan pelaporan persediaan logistik obat yang dilakukan oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman sudah sesuai dengan teori Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi/Kabupaten/Kota tentang pencatatan dan pelaporan persediaan logistik obat.

8). Dari penghapusan persediaan logistik obat yang dilakukan oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman sudah sesuai dengan teori Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi/Kabupaten/Kota tentang penghapusan persediaan logistik obat.

9). Dari pengawasan persediaan logistik obat yang dilakukan oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman sudah sesuai dengan teori Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi/Kabupaten/Kota tentang pengawasan persediaan logistik obat.



5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu : tidak diketahui biaya penyimpanan dengan menggunakan metode konsumsi yang dilakukan oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman. Hal ini menyebabkan tidak bisa dilakukan perbandingan antara biaya penyimpanan menggunakan metode konsumsi dengan metode *Economic Order Quantity* (EOQ).

5.3 Saran

Untuk meningkatkan kegiatan pengelolaan persediaan logistik obat pada UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman agar lebih sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi/ Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan:

a. Dari faktor *input*, dapat disarankan bebarapa hal:

- 1). Mengusulkan penambahan jumlah tenaga atau personil dari Kepala UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman kepada Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan seterusnya Kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman, khususnya penambahan tenaga administrasi, tenaga supir, tenaga pengaman dan tenaga kasar/kebersihan/angkut masing-masing sebanyak 1 (satu) orang.
- 2). Agar UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman melalui Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman selalu melakukan sinkronisasi anggaran kepada Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), sehingga dana yang didapatkan (khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK)) untuk pengadaan persediaan logistik obat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman.
- 3). Adanya penambahan sarana terutama pada sarana pengamanan seperti alarm dan pemadam kebakaran.

b. Dari faktor *process*, dapat disarankan beberapa hal:

1). Agar UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan Puskesmas-Puskesmas di Kota Pariaman untuk membuat perencanaan kebutuhan persediaan logistik obat dengan menggunakan metoda morbiditas.

2). Agar UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan Puskesmas di Kota Pariaman lebih memaksimalkan proses perencanaan persediaan logistik obat sehingga dana yang jumlahnya jauh lebih besar dari dana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan persediaan logistik obat pada tahun berikutnya pada proses pengadaan persediaan logistik obat dapat optimal serta dapat menekan jumlah persediaan logistik obat yang *expire date* atau kadaluarsa pada tahun-tahun selanjutnya.

3). Supaya UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman melalui Dinas Kesehatan Kota Pariaman dapat menambahkan beberapa syarat pada dokumen kontrak pengadaan persediaan logistik obat yang berkaitan dengan pendistribusian persediaan logistik obat dari rekanan pemenang pengadaan persediaan logistik obat kepada UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman. Hal ini dimaksudkan agar Dinas Kesehatan Kota Pariaman dapat menerapkan metode *Economic Order Quantity* (EOQ) yang akan meminimalkan biaya penyimpanan persediaan logistik obat pada UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman jika jumlah pemesanannya sedikit.

- 4). Supaya UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman juga lebih memperhatikan proses penyimpanan persediaan logistik obat, khususnya persediaan logistik obat yang dapat dipengaruhi oleh temperatur, udara, cahaya dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai.
- 5). Perlunya perhatian terhadap ketepatan waktu didalam pelaksanaan pendistribusian persediaan logistik obat ke Puskesmas-Puskesmas tersebut, karena bisa mempengaruhi terhadap pelayanan obat kepada pasien di Puskesmas.
- 6). UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman juga perlu melakukan atau membuat laporan kegiatan distribusi dan laporan pencacahan persediaan akhir tahun anggaran (31 Desember) selain juga tetap melakukan laporan-laporan yang sudah dilakukan selama ini.
- 7). Supaya UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman lebih diperhatikan lagi masa kadaluarsa persediaan logistik obat agar dapat meminimalkan banyaknya persediaan logistik obat yang *expire date* atau kadaluarsa untuk dimusnahkan pada kegiatan penghapuan persediaan logistik obat setiap tahunnya.
- 8). Sebaiknya UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman lebih sering melakukan kegiatan supervisi terhadap Puskesmas-Puskesmas di Kota Pariaman dan evaluasi terhadap UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman sendiri sehingga diharapkan adanya peningkatan terhadap semua aspek

pengelolaan persediaan logistik obat pada UPT. Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan Puskesmas yang ada di Kota Pariaman.

